

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Jurnal Nasional

Hari : Minggu

Subyek : Bencana Alam

Tanggal : 31 Oktober 2010

Hal : 01

Korban Tsunami Mesti Pindah

Staf Khusus Presiden Bidang Bencana, Andi Arif, mengatakan warga Mentawai, Sumatera Barat yang kini menjadi korban tsunami tidak memiliki pilihan lain kecuali merelokasi diri ke tempat yang lebih aman.

"Untuk Mentawai memang tidak ada obatnya kecuali merelokasi masyarakatnya ke tempat yang lebih aman. Karena bukan hanya tsunami yang mengancam, tetapi lama kelamaan pulaunya juga bisa tenggelam," kata Andi saat diskusi bertajuk "Polemik: Bencana dan Duka Indonesia" di Jakarta, Sabtu (30/10).

Andi mengakui, relokasi penduduk Mentawai bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah karena membutuhkan waktu yang panjang untuk memberikan pengertian kepada masyarakatnya.

Gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Richter yang menimbulkan tsunami di Mentawai telah merenggut ratusan jiwa. Hingga Sabtu (30/10) siang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat mencatat korban tewas akibat gempa dan tsunami di Mentawai telah mencapai 413 orang. "Jumlah itu sangat mungkin bertambah, karena dari laporan BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat 298 orang hilang," kata Kepala BPBD Sumatera Barat Harmensyah di Padang kemarin.

Dari laporan yang masuk, kata Harmensyah, bencana di Bumi Sikerei (julukan Mentawai) itu juga mengakibatkan korban luka berat 270 orang dan luka ringan 162 orang. "Empat korban yang butuh perawatan intensif karena mengalami patah tulang, sejak malam kemarin (Jumat) sudah dievakuasi ke (Rumah Sakit) M Djamil Padang," ujarnya.

Menurutnya, korban tewas paling banyak di Dusun Muntei, Desa Betumonga, Pagai utara sebanyak 103 orang. "Saat ini korban gempa yang tinggal di pengungsian mendekati 25 ribu orang," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Mentawai, Nikanor Saguruk mengatakan korban gempa dan tsunami Mentawai di dua desa yakni Bosua dan Beriulou, Kecamatan Sipora Selatan, sampai hari kelima kemarin belum terjamah bantuan apa pun.

"Mereka membangun tempat pengungsian dengan kayu bekas puing rumah mereka beratapkan daun puhon kelapa di daerah perbukitan," ujar Nikanor, Sabtu (30/10), saat dihubungi dari Padang.

Menurutnya, sekitar 400 pengungsi di dua desa itu sangat memprihatinkan, ketiadaan bahan makanan dan selimut serta obat-obatan semakin mendera pengungsi bencana tersebut. "Saya sudah beritahu Posko di Sikakap untuk menyalurkan logistik bencana ke dua desa ini," ujarnya.

Wakil Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet dihubungi siang menegaskan, bantuan logistik ke pengungsi dari Pemkab Mentawai untuk korban gempa di Sipora Selatan sudah didistribusikan tiga hari lalu. "Tapi karena bantuan sangat minim mungkin untuk hari-hari ke depan butuh pasokan bantuan kembali," ujarnya.

Menurut Yudas, kemarin pihaknya kembali mendistribusikan bantuan berupa bahan makanan dan obat-obatan ke Sipora Selatan. "Saat ini sedang disalurkan tiga ton beras, puluhan dus mi instan, makanan ringan, selimut, tenda dan obat-obatan, yang berasal dari Pesisir Selatan," ujarnya.

Yudas mengatakan, kendala cuaca membuat pendistribusian bantuan ke kawasan bencana sulit, apalagi jalan ke lokasi pengungsian yang masih tertutup pohon tumbang belum dibersihkan. Padahal relawan yang sudah berada di daerah bencana sangat mencukupi untuk proses penyaluran bantuan dan evakuasi korban. Hal ini diakui juga oleh Kepala Administrator Pelabuhan (Adpel) Teluk Bayur, Purnama Meliala. "Sejak 26 Oktober sampai Jumat malam tadi, tercatat 1.259 relawan kita berangkatkan dari Padang," ujar Purnama.

Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Leonardus JP Siegers mengatakan, pihaknya siap memberangkatkan 600 anggota TNI tambahan untuk membantu korban gempa dan tsunami di Mentawai. "Saat ini 360 prajurit sudah kita terjunkan ke lokasi bencana, mereka disebar di berbagai daerah pengungsian dan juga bertugas melakukan pencarian korban gempa dan tsunami," ujarnya. Menurutnya, 600 pasukan tambahan untuk mendukung operasi kemanusiaan ke Mentawai tersebut diberangkatkan dengan kapal milik TNI AL. "Selanjutnya Posko induk TNI sebelumnya di Bungus, kini pindah ke Muko-Muko Bengkulu karena lebih efektif mem-back up operasi," ujarnya.

Tim Basarnas dan relawan kemanusiaan kesulitan menembus medan laut menuju daerah pengungsian di kawasan Pagai Selatan. "Kalau dipaksakan bisa membahayakan jiwa tim evakuasi dan relawan," ujar Hendri seorang relawan yang ikut kapal kecil bersama tim Basarnas.

Menurut Hendri pengalamannya menjadi relawan, kondisi cuaca di Mentawai paling parah untuk menembusnya. "Butuh kapal lebih besar agar segera mencapai daerah terpencil di beberapa pulau terluar, kalau mengandalkan *speedboat* saya yakin terlalu riskan dengan kondisi cuaca seperti sekarang ini," ujarnya. Menurut Pusdalops PB Sumbar Ade Edward, BPBD Sumbar sudah menyiapkan dua unit helikopter di Sikakap untuk penyaluran cepat ke daerah pengungsian. "Kita tidak mengandalkan *speedboat* saja, distribusi logistik juga kita kirim lewat udara," ujarnya.

Ketua DPRD Sumbar Yul Tekhnil mengatakan, dana penanganan bencana sebesar Rp3 miliar siap dikucurkan dari APBD Perubahan Sumbar 2010. "Karena waktu penggunaan dua bulan lagi, kita minta gubernur untuk mengefektifkan anggaran ini segera dengan memprioritaskan pemulihan korban," ujar Yul Tekhnil. Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Sumbar Zulkifli Djailani menegaskan tidak mesti malu mengusulkan bencana Mentawai sebagai bencana nasional. "Karena kemampuan kita sangat terbatas," ujarnya.

Lebih Sigap

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Yudi Wijana, menilai pemerintah daerah kurang sigap dalam penanggulangan bencana Mentawai. Kesigapan justru datang dari para relawan ketimbang birokrat-birokrat yang ada di lapangan. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah masih menganggap badan penanggulangan bencana sebagai beban APBD. "Saya menyaksikan betapa masyarakat sangat menghargai relawan-relawan," kata Yudi saat diskusi bertajuk "Polemik: Bencana dan Duka Indonesia" di Jakarta, Sabtu (30/10).

Penanganan bencana, kata Yudi, belum menjadi kesadaran bersama baik di tingkat nasional dan khususnya di pemerintah daerah. "Para ahli di Jepang meyakini, mereka yang menjadi korban tsunami karena tidak mengerti apa itu tsunami," kata Yudi.

Yudi menilai pemerintah perlu terus mengoptimalkan peran dalam pemberian informasi tentang aspek bencana, seperti pendidikan kesadaran bahaya bencana di media massa agar mereka tahu bagaimana cara mengantisipasi bencana baik sebelum datang maupun setelah datang. Informasi mengenai bahaya bencana seperti tsunami saat ini hanya dilakukan oleh BMKG. Namun, tidak jarang terjadi kesalahpahaman di antara masyarakat mengenai informasi yang diberikan oleh BMKG seperti yang terjadi di Mentawai.

Pri Haryadi, Deputi Bidang Geofisika BMKG, mengatakan, sistem peringatan dini tsunami di manapun mekanisme kerjanya berdasarkan sistem jaringan pengamatan gempa bumi atau seismograf. Indonesia sendiri memiliki 160 jaringan yang dipasang di seluruh wilayah berpotensi tsunami.

Jaringan seismograf bisa menentukan lokasi sumber gempa dan kekuatannya dalam waktu tiga menit. Ada beberapa kriteria untuk mengeluarkan peringatan dini tsunami, yaitu pertama sumber gempanya di laut, kedua kedalamannya kurang dari 70 km, dan yang ketiga magnitudonya lebih dari 7 skala Richter.

"Sumber gempa yang kemarin (Mentawai) memenuhi persyaratan itu. Sehingga kita keluarkan peringatan dini tsunami," kata Pri.

Menurut salah seorang relawan, Kiki, penanganan bencana alam harus menggunakan prinsip First In First Out (FIFO). Hal itu agar bisa segera ditindaklanjuti dan manajemennya tidak amburadul. Ketersediaan uang suatu negara dalam menangani bencana bukanlah alasan utama cepat dan tepatnya tindakan.

Kiki membandingkan penanganan yang dilakukan oleh Jepang dan Indonesia. Menurutnya kesigapan respons Jepang ketika dimintai bantuan oleh Sri Lanka dan hanya dalam waktu delapan jam armada pesawat bantuan Jepang sudah berada di lokasi merupakan buah dari koordinasi yang baik. "Ini problem manajemen bukan bantuan. Masalahnya setiap orang (di Indonesia) membawa benderanya masing-masing," tambahnya.

"Partai bawa bungkus mi instannya 10, tapi benderanya 20," selorohnya.

Dia juga menyindir bahwa yang paling menarik adalah yang berada di ujung setelah tahap tanggap darurat dan rehabilitasi, yaitu rekonstruksi. "Yang paling diperebutkan itu rekonstruksi."

Menurutnya relawan yang turun ke lapangan harus dipimpin oleh seseorang yang memiliki karakter *strong leadership*. Pasalnya kendala utama dalam menanggulangi bencana manajemennya sangat sulit.

"Tanpa kepemimpinan yang kuat, omong kosong kita bisa menanganinya ini," tandas Kiki.